

Perempuan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Rara Ririn Budi Utamingtyas

Staf Pengajar Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang
ririnaribowo@gmail.com

Abstract: Peran perempuan pada saat ini bukan hanya mengasuh anak dan mengatur kehidupan rumah tangga saja tetapi sekaligus mampu menjadi agen perubahan atau agen pembangunan terutama dalam pengembangan sumber daya manusia, indeks sumber daya manusia sangat sensitif gender. Perempuan memberikan kontribusi dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui tugas domestik maupun publik. Di Indonesia peran perempuan dalam pembangunan di antaranya melalui kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), banyak pesan pembangunan oleh pemerintah disampaikan melalui perempuan dalam kegiatan PKK dengan 10 Program Pokok PKK yang kadang lebih efektif dari pada disampaikan melalui laki-laki. Budaya Indonesia keluarga adalah fondasi bangsa dan masyarakat. Peran seorang ibu menjadi sangat penting karena ibu pengelola dan pengambil keputusan dalam keluarga, juga bertanggung jawab dan menjaga tumbuh kembang anak. Perempuan berperan dalam keluarga dan mendidik generasi penerus bangsa, perempuan Indonesia mendukung program-program pembangunan pemerintah seperti perbaikan gizi, kesehatan, keluarga kecil sejahtera, dll.

Keywords: women, development

I. PENDAHULUAN

Peran perempuan pada saat ini bukan hanya mengasuh anak dan mengatur kehidupan rumah tangga saja tetapi sekaligus mampu menjadi agen perubahan atau agen pembangunan terutama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu hal penting bagi suatu negara. Dari hasil pengembangan sumber daya manusia akan tergambar nyata bagaimana tingkat kesejahteraan warga negaranya termasuk Indonesia, UNDP (*United Nations Development Program*) sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa setiap tahun melaporkan *HDI (Human Development Index)* atau indeks pengembangan sumber daya manusia berbagai negara termasuk Indonesia. Tahun 2012 Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia berada pada ranking 124 dari 150 negara. Dilaporkan juga Indeks Kesejahteraan Masyarakat berada pada ranking 108 dari 184 negara, Menurut T.V Rao (1996) Indeks Sumber Daya Manusia sangat sensitif gender. Di berbagai negara perempuan memberikan kontribusi dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai tugas domestik (tugas dalam rumah tangga seperti merawat, mendidik anak) juga tugas public (di luar rumah tangga seperti menjadi pedagang di pasar, pekerja, Pegawai Negeri Sipil, guru, dll). Pengembangan sumber daya manusia selalu melibatkan perempuan.

Di Indonesia peran perempuan dalam pengembangan sumber daya manusia sangat jelas terlihat di antaranya melalui kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), banyak pesan pembangunan oleh pemerintah disampaikan melalui perempuan dalam kegiatan PKK bahkan lebih efektif dari pada disampaikan kepada laki-laki (Utamingtyas,2015). Sering kali PKK dianggap tidak memiliki peran penting dan diabaikan masyarakat, padahal PKK mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat. Peran PKK dalam arti luas adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui gerakan PKK (Tim Penggerak PKK Pusat, 2010). PKK berupaya tidak hanya mendidik perempuan, melainkan membina dan membangun keluarga di bidang mental spiritual, fisik, material, serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan dan lingkungan hidup. (Trisakti Handayani, 2010). Kita masih menghadapi berbagai permasalahan seperti masalah moral, kurangnya budaya malu, masalah ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak (*human trafficking*), dan sebagainya yang semuanya memerlukan prioritas untuk penanganan dan penanggulangannya. Gerakan PKK sebagai bentuk partisipasi masyarakat bergerak dan mengisi pembangunan melalui 10 program pokok PKK. Budaya Indonesia menurut UNICEF (dalam T.V Rao, 2010) masih meyakini bahwa keluarga adalah fondasi masyarakat dan bangsa. Konsekuensinya hubungan masyarakat dipengaruhi hubungan dalam keluarga. Peran seorang ibu menjadi sangat penting karena ibu pengelola dan pengambil keputusan dalam keluarga, juga bertanggung jawab dan menjaga tumbuh kembang anak. Perempuan berperan dalam keluarga dan mendidik generasi penerus bangsa, perempuan Indonesia mendukung program-program pembangunan pemerintah seperti pemberantasan buta huruf, keluarga berencana, kesehatan, perbaikan gizi, lingkungan hidup dan koperasi.

Dalam gerakan PKK di Indonesia terdapat kader yang melaksanakan berbagai program kegiatan pembangunan. Kader PKK berasal dari, oleh dan untuk perempuan sehingga menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dalam PKK dilaporkan dan dicatat jumlah perempuan hamil dan menyusui, imunisasi pada anak balita, mengidentifikasi jumlah orang dewasa buta huruf, kelompok belajar non formal. Gerakan PKK melalui kader-kadernya memobilisasi partisipasi masyarakat dalam aktivitas pembangunan desa, karena gerakan PKK ada sampai level terendah tingkat Rukun Tetangga (RT) bahkan diperkecil lagi dalam kelompok Dasa Wisma (Dawis). Dengan demikian melalui gerakan PKK pesan pembangunan lebih cepat sampai kepada masyarakat.

II. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan

Pemberdayaan perempuan diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk mengatur sendiri hidupnya. Dapat menentukan agendanya sendiri, menambah ketrampilannya, meningkatkan kepercayaan dirinya, memecahkan masalah dan membangun kemandiriannya (Utaminingsyas, 2009). Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan kerja produktif, reproduktif, privasi, dan publik adalah pemberdayaan (Mosse, 1996). Pendekatan ini lebih memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal. Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), dari pada pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*). Pendekatan pemberdayaan, seraya mengakui perlunya pembuatan undang-undang yang bersifat mendukung, berpendapat bahwa perkembangan organisasi perempuan yang mengarah pada mobilisasi politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat seperti gerakan PKK merupakan syarat penting bagi perubahan sosial yang berkelanjutan. Organisasi perempuan menawarkan kemungkinan pemberdayaan dan perubahan pribadi. Ada banyak kata yang memiliki makna sama dengan kata pembangunan, seperti misalnya perubahan sosial. Pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi. Dari kata tersebut hanya ada satu istilah yang memberi makna perubahan ke arah positif yaitu perubahan sosial.

Menurut Silvia Walby (1998) perempuan ditinjau dari gender lebih perhatian pada merawat, mendidik anak dibandingkan laki-laki, mereka lebih berminat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak-anak dari pada bekerja di kantor. Selanjutnya Walby (1998) mengemukakan bahwa karakteristik merawat pada

perempuan tidak terbatas dalam rumah tangga saja tetapi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kebanyakan perempuan bekerja di bidang kesehatan dan pendidikan.

Perempuan dan pembangunan pada umumnya terpusat pada dampak pembangunan bagi perempuan, dan bukan pada pembangunan sebagai hasil partisipasi perempuan. Berbagai hasil penelitian mengisyaratkan bahwa pembangunan memang memungkinkan munculnya peningkatan agregat dalam aspek-aspek sosial ekonomis kehidupan penduduk di banyak negara berkembang. Integrasi perempuan dalam pembangunan dalam arti sesungguhnya akan menghasilkan dua keuntungan. Pertama, dilihat dari perspektif pembangunan, integrasi semacam ini memungkinkan penggunaan secara efektif sumber daya manusia yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Pada gilirannya integrasi perempuan dalam pembangunan akan mempercepat laju pembangunan. Kedua dilihat dari perspektif perempuan, integrasi mereka secara penuh kedalam pembangunan, akan memungkinkan mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memanfaatkan potensi mereka mencapai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

Pemikiran feminis yang memusatkan perhatian kepada 'perempuan' mengasumsikan bahwa munculnya permasalahan kaum perempuan disebabkan rendahnya sumber daya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki dalam pembangunan. Oleh karena itu dilakukan upaya guna menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik perempuan. Ada beberapa alasan dari analisis "mengejar" keteringgalan kaum perempuan ini meski bertumpu pada paham modernisasi. Pertama adalah pendekatan "pengentasan kemiskinan", dimana dasar pemikirannya perempuan menjadi miskin karena mereka tidak produktif sehingga perlu diciptakan proyek peningkatan pendapatan. Kedua adalah pendekatan "efisiensi" yakni pemikiran bahwa pembangunan mengalami kegagalan karena perempuan tidak dilibatkan (Mosso, 1996).

Dalam banyak kasus, proyek-proyek yang dikembangkan perlu memperbaiki dampak dari model pembangunan. Kenyataan bahwa pendekatan kesejahteraan yang meletakkan perempuan sebagai hasil persepsi khusus tentang perempuan, bahwa menjadi ibu dan membesarkan anak merupakan tugas utama perempuan. Kenyataan ini juga memberi asumsi lain bahwa perempuan hanyalah penerima pasif pembangunan. Kesejahteraan meliputi banyak jenis pembangunan yang sudah dikenal, program kesehatan ibu-anak, skema pembaruan ASI, pelayanan keluarga berencana, dan sebagainya. Program kesejahteraan tetap sangat populer sebagai cara untuk menjangkau perempuan dalam menciptakan kemerdekaan dan kemandirian (Mosso, 1996).

III. Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perempuan memainkan suatu peran kunci dalam pembangunan, terutama dalam keluarga dan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi dan sistem sosial. Dalam pengembangan sumber daya manusia perempuan berada dalam posisi strategis, mereka adalah orang pertama dalam mendidik anak dan mengelola rumah tangga. Gadis dan perempuan terdidik memberikan sumbangan nyata dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai cara. Ibu berpendidikan cenderung memberikan pendidikan yang baik dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Mereka mampu mengatur gizi, dan menjaga kesehatan anaknya, mampu menjadi manajer rumah tangga yang lebih baik dan memiliki pengetahuan yang baik sebagai produsen, konsumen dan pelaku ekonomi. Tidak ada satu negarapun yang berhasil dalam pembangunan tanpa mengembangkan kapabilitas (kemampuan) perempuan dengan melakukan pemberdayaan perempuan (Rao, 1996). Hal itu disebabkan kebanyakan negara berkembang, perempuan memiliki akses yang lebih rendah untuk pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kekuasaan dibandingkan laki-laki. Level kesehatan dan nutrisi perempuan juga lebih rendah

dibandingkan laki-laki. Angka kematian negara-negara berkembang 18 kali lebih banyak dibandingkan negara maju. Data statistik menunjukkan bahwa perempuan masih berhadapan dengan berbagai diskriminasi, dalam berbagai hal pada masyarakat yaitu dalam perawatan kesehatan, makanan, termasuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Perempuan juga berperan dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui tugas-tugas rumah tangga merawat anak, mendidik anak-anak dan bekerja.

Pemberdayaan perempuan diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk mengatur sendiri hidupnya. Dapat menentukan agenda (rencananya) sendiri, menambah kerampilan, meningkatkan kepercayaan dirinya, memecahkan masalah dan membangun kemandiriannya. Melalui program-program pemberdayaan perempuan akan mencapai kemandirian, kebebasan bagi perempuan untuk melakukan yang diinginkan dan bebas memenuhi hak-haknya, mandiri mengambil keputusan, tidak dipengaruhi orang lain, dan membantu perempuan keluar dari persoalan-persoalan yang menghimpit mereka, yaitu kemiskinan, pendidikan yang rendah, kesehatan yang memprihatinkan, terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

TV Rao (1996) mengemukakan beberapa strategi pemberdayaan perempuan yaitu dengan:

1. Mendidik anak gadis dan perempuan.
2. Memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan dan kemampuan perempuan memperoleh penghasilan, pendapatan, dan akses kredit usaha
3. Melibatkan perempuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.
4. Perubahan Sosio kultural dengan menggali isu-isu gender dan peningkatan implementasi efektif terhadap kesamaan hak.

Mendidik Anak Gadis dan Perempuan

ADB (1991) dalam Rao (1996) dengan meningkatkan pendidikan ibu selama satu tahun dapat diasosiasikan dengan mengurangi 9 % (persen) angka kematian anak balita. Dengan memperbaiki pendidikan juga meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas pembangunan masyarakat juga kesempatan meningkatkan pendapatan. Ibu yang pendidikannya lebih baik akan lebih baik dalam mendidik anak generasi penerus. Melalui pendidikan untuk perempuan dapat membawa dampak sosial yang lebih besar dibandingkan mendidik laki-laki. Negara dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, mengurangi tekanan populasi dan generasi penerus yang lebih baik. Mendidik perempuan merupakan strategi intervensi yang mendukung pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas masyarakat. Termasuk dalam menanamkan nilai kejujuran dan sikap anti korupsi di tengah keluarga, seperti disampaikan Craig Ewers dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dalam pelatihan perempuan anti korupsi bahwa "perempuan selain mendidik keluarga sekaligus menularkan nilai-nilai kejujuran kepada lingkungannya". Sedangkan menurut wakil pimpinan KPK Adnan Pandu Praja menjelaskan dengan perempuan dilibatkan menjadi Saya Perempuan anti korupsi dengan berbasis keluarga sejak awal korupsi bisa dicegah, tidak hanya menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada keluarga tetapi juga pada lingkungan sekitar (Nova, Juni 2015)

Partisipasi Perempuan dalam Aktivitas Ekonomi

Beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan yang signifikan prosentase perempuan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, untuk mencapai kemandirian ekonomi pada perempuan. Dengan demikian status perempuan yang meningkat peran mereka dalam mengambil keputusan juga meningkat. Antara kebijakan-kebijakan dalam pendidikan dan ekonomi berkaitan erat. Kebijakan-kebijakan makro ekonomi dapat mendukung dalam memperkerjakan perempuan, mampu memberi kesempatan

perempuan untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan, kesempatan berwirausaha, meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas-aktivitas produksi, memberikan kredit modal dan pelatihan berwirausaha. Dengan perempuan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi mampu memperbaiki standar kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian strategi pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada pemberdayaan ekonomi adalah dengan mengenali potensi yang dimiliki perempuan dalam kekuatan ekonomi. Dalam berwirausaha kebanyakan ibu-ibu berada dalam kelompok usaha kecil dimana usaha yang dijalankan merupakan bisnis pribadi dengan modal kecil, akses kecil dalam teknologi modern dan kredit, produktivitas dan pendapatan lebih rendah. Bisnis kecil perempuan banyak dipusatkan dalam perdagangan, distribusi, kerajinan tradisional dan pelayanan dalam skala kecil (Utamingtyas, dkk 2007)

Melibatkan Perempuan dalam Formulasi Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Berbagai kebijakan dan program pemerintah berpengaruh pada cara dan perlakuan terhadap perempuan oleh masyarakat meliputi kebijakan-kebijakan sosial, sistem hukum, dan kebijakan institusi publik. Menurut Rao (1996) Pemerintah Indonesia adalah salah satu contoh yang baik dalam menggerakkan perempuan untuk berpartisipasi pada masyarakat mulai dari masyarakat level paling bawah hingga memberi kesempatan pada perempuan untuk menjadi anggota DPR dalam menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan, dengan cara memperbaiki kesejahteraan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah melalui proyek-proyek peningkatan pendapatan, meningkatkan kapabilitas sebagai ibu, pendidik dan manajer rumah tangga, memperbaiki kondisi pertanian dan industri kecil yang dilakukan oleh ekondisi kesehatan. Peningkatan prosentase keterwakilan perempuan di DPR hingga DPRD akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik. Beberapa penelitian membuktikan perempuan mampu memberikan efek politik lebih feminin yakni politik yang tidak konfrontatif, penuh kekerasan, namun bersifat konsensual atau bekerja sama untuk mencari pemufakatan dan konstruktif seperti dikemukakan Fitriyah dari FISIP Universitas Diponegoro dalam Seminar Pendidikan Politik bagi perempuan yang diselenggarakan badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng dengan Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Jateng (dalam Suara Merdeka Mei 2013). Lebih lanjut disampaikan bahwa di Indonesia keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai batas angka minimal sebesar 30%. Sedikitnya perempuan menjadi anggota parlemen karena umumnya perempuan percaya bahwa laki-laki lebih layak dan harus menjadi pemimpin, sebagaimana kepercayaan kultural dan religius. Peran perempuan dalam pembangunan harus berkembang secara harmonis dengan peran mereka dalam membangun kesehatan dan kesejahteraan keluarga, mendidik anak balita dan remaja sebagai generasi penerus dan dalam konteks pembangunan dari seluruh warga negara Indonesia. Dengan meningkatkan status dan peran dan status perempuan telah membuka kesempatan perempuan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Perubahan Sosiokultural Dengan Menggali Isu Gender Dan Mempromosikan Implementasi Efektif Persamaan Hak

Dalam dunia internasional peran perempuan dalam pembangunan mengenal apa yang disebut sebagai *Forward Looking Strategy (FLS) for the Advancement of woman* yang berisi tiga butir yang bersifat Trilogi yaitu *equity, development, and peace*. Strategi ini dicanangkan di Nairobi tahun 1985. Untuk Indonesia konsep gender equity tidak cukup diterjemahkan menjadi sekedar persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita di segala bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat, begitu pula dengan konsep *women in development* belum cukup jelas bila hanya diartikan sekedar terintegrasikannya peranan wanita dalam pembangunan, bagaimana dengan *peace*? Di Indonesia dalam kaitannya dengan FLS tentang peranan wanita ini dalam rumusan mitra kesejajaran, dalam forum internasional kemitrasejajaran Indonesia diterjemahkan *harmonius gender*

partnership dalam arti pria dan wanita adalah *equal partners in harmonius relationship* (Mien Sugandhi, 1997). Kemitrasejajaran adalah suatu kondisi ideal (normatif) yang untuk mencapainya diperlukan kebijaksanaan dan program. Kebijakan untuk mencapainya termuat dalam butir-butir GBHN 1993 yang esensinya adalah:

1. Wanita mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan, karena wanita merupakan mitra sejajar pria. Disamping itu kedudukan wanita dalam keluarga perlu ditingkatkan, demikian pula pengakuan terhadap kodrat wanita yang harus dilindungi dan martabat wanita dijunjung tinggi.
2. a) Peningkatan kemampuan wanita dalam pembangunan diarahkan pada penguasaan IPTEK, proses pengambilan keputusan dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat maupun dunia internasional.
b) Penguatan dan peningkatan ketahanan mental dan spiritual agar dapat memanfaatkan kesempatan berperan aktif dalam segala bidang kehidupan bangsa dan segenap kegiatan pembangunan.
c) perlunya pengembangan iklim sosial yang lebih mendukung kemajuan wanita
3. Peningkatan upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga antara lain melalui Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga, juga pengembangan kesadaran orang tua akan peranan dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak dan remaja yang bertumpu pada budaya bangsa, juga melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
4. Peningkatan peranan wanita dalam menangani masalah sosial ekonomi diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemeliharaan lingkungan.
5. a) Peningkatan ketrampilan, produktivitas tenaga kerja wanita untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja wanita di berbagai lapangan pekerjaan
b) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja wanita termasuk tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri terutama mengenai kesehatan, pengembangan karir, dan pelayanan jaminan sosial termasuk keluarganya.

Program-program peningkatan peranan wanita diarahkan pada upaya memungkinkan wanita (*women empowerment*) agar dapat berperan sebagai mitra kerja yang berkualitas dan handal serta menjamin diperolehnya manfaat bagi wanita secara memadai.

IV. KESIMPULAN

Perempuan dan pembangunan pada umumnya terpusat pada dampak pembangunan bagi perempuan, dan bukan pada pembangunan sebagai hasil partisipasi perempuan. Berbagai hasil penelitian mengisyaratkan bahwa pembangunan memang memungkinkan munculnya peningkatan agregat dalam aspek-aspek sosial ekonomis kehidupan penduduk di banyak negara berkembang. Integrasi perempuan dalam pembangunan dalam arti sesungguhnya akan menghasilkan dua keuntungan. Pertama, dilihat dari perspektif pembangunan, integrasi semacam ini memungkinkan penggunaan secara efektif sumber daya manusia yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Pada gilirannya integrasi perempuan dalam pembangunan akan mempercepat laju pembangunan. Kedua dilihat dari perspektif perempuan, integrasi mereka secara penuh kedalam pembangunan, akan memungkinkan mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memanfaatkan potensi mereka mencapai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Program peningkatan peranan perempuan diarahkan pada upaya memungkinkan perempuan (*women empowerment*) agar dapat berperan sebagai mitra kerja laki-laki yang berkualitas dan handal serta menjamin diperolehnya manfaat bagi perempuan secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Trisakti. 2010. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Malang dalam Perspektif Kajian Budaya. *Disertasi*.
<http://www.metrotanjung.com> 2011/07. TP PKK HST Gelar Pelatihan LP#-PKK. *Surat Kabar Mingguan Metro*
- Mosse, Yulia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Diterbitkan atas kerja sama Fifka Annisa Women's Crisis Center
- Nova. 2015. Pelatihan Perempuan Anti Korupsi. *Tabloid Nova*. No 1423/XXVIII 1-7 Juni 2015.
- Rao, T.V.1996. *Human Resources Development. Experiences, Interventions, Strategies*. New Delhi: Sage Publications
- Suara Merdeka, 2013. Perempuan Beri Efek Politik Feminin, *Suara Merdeka*.Semarang: Rabu 29 Mei 2013
- Sugandhi, Mien. 1997. Pokok-pokok Peranan Wanita. *Membicarakan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. (Bunga Rampai) Editor: Dadang S Anshori, Engkos Kosasih, Farida Sarimaya. Bandung: Pustaka Hidayah. Perekonomian Keluarga di Semarang, *Laporan Penelitian*. Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
- Tim Penggerak PKK Pusat periode 2010-2015. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) *Hasil Rapat Kerja Nasional PKK tahun 2010*. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.
- Utamingtyas, Rr Ririn Budi. 2007. Pengaruh Tingkat Kemandirian Perempuan yang Tidak Bekerja Terhadap Motivasi Berwirausaha Dalam Mendukung
- Utamingtyas, Rr Ririn Budi. 2009. Budaya Patriarki dalam Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Volume 9 Nomor 1, April 2009.
- Utamingtyas, Rr Ririn Budi, dkk. 2013. Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK Sebagai Agen Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Laporan Penelitian*. Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
- Walby, Sylvia. 1998. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Blackwell Publishers. Ltd